

Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Perbincangan Konseptual

Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff

Leo Agustino, Dosen di Program Sains Politik, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi (PPSPS), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia.

Mohammad Agus Yusoff, Profesor Madya dalam Program Sains Politik di Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi (PPSPS), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Sains Politik, PPSPS, FSSK, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Demokrasi adalah salah satu produk pemikiran Barat yang telah melewati perjalanan sejarah panjang sejak zaman Yunani kuno. Konsep ini pernah sekian lama diabaikan dalam perkembangan wacana arus utama, namun kembali populer pada abad ke-18 dan menjadi perbincangan tanpa henti ketika gelombang demokratisasi menerpa negara-negara di dunia sejak tahun 1970-an. Hal menarik dari konsep demokrasi adalah inspirasi pemikiran yang ditimbulkannya terhadap transformasi politik di banyak negara, baik di Eropa, Asia, Afrika maupun Amerika Latin. Pemikiran seperti ini mengilhami banyak sarjana dan aktivis di banyak negara berkembang yang juga tengah bergulat melawan rejim otokratik untuk mendalaminya.

Sekarang ini, demokrasi selalu menjadi berita istimewa di pelbagai media massa, baik di surat kabar, televisi, blog ataupun terbitan periodikal lainnya. Demokrasi tidak hanya dibincangkan dalam konteks umum, seperti dalam media-massa, tetapi juga dalam ruang-ruang publik yang lebih khusus.

Umpamanya, demokrasi turut dibahas oleh akademisi dari berbagai disiplin seperti pakar ilmu politik, ilmu alam, hukum dan lainnya. Hal ini misalnya, terlihat ketika pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia pasca-Orde Baru—yang diadakan pada 5 Juli 2004, ditayangkan secara luas ke seantero jagat dan menyedot perhatian warga dunia. Demokrasi juga dibincangkan di restoran, stadion sepak bola, *mall*, terminal dan banyak tempat lainnya. Realita ini menunjukkan bahwa demokrasi telah diterima sebagai kata penting pada abad ke-21 ini. Namun persoalannya, yang kerap tidak disadari ialah, apa sebenarnya arti demokrasi? Kemudian, mengapa ada masyarakat yang mau melaksanakan sistem demokrasi, sementara masyarakat lainnya tidak? Faktor apa yang mendorong sebuah negara menganut sistem demokrasi dan negara lain menganut sistem nondemokrasi? Ada kebaikan apa sebenarnya, di balik demokrasi?

Beberapa pertanyaan di atas dibahas dalam artikel ini secara subtil agar menggambarkan perbedaan kedua konsep tersebut diatas. Oleh karena itu, pembabakan artikel dibagikan ke dalam tiga bagian. *Pertama*, membicarakan perdebatan definisi demokrasi oleh beberapa sarjana. *Kedua*, membicarakan konsep demokratisasi sebagai media pergerakan dari rejim nondemokrasi ke arah rejim demokrasi. *Ketiga*, membahas beberapa faktor pendorong demokratisasi dan mengelaborasi peranan

elit dalam usahanya mencetuskan demokratisasi.

Demokrasi Dalam Pandangan Beberapa Sarjana

Penulisan dan penelitian mengenai definisi demokrasi telah banyak dilakukan oleh ramai sarjana. Pada pertengahan abad ke-20, umumnya mereka mentakrifkan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana demokrasi terkait dengan (i) sumber kuasa, (ii) tujuan aktivitas pemerintah dan (iii) prosedur pemerintahan (Lipset 1963:32-33; Bollen 1980:372; Huntington 1991b:6).¹ Tilly (2007:7) pula menegaskan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibagikan ke dalam empat kategori, yaitu (i) perlembagaan, (ii) substansi, (iii) prosedur dan (iv) proses orientasi.² Kelanjutan dari tipo-

¹ *Pertama*, sumber kekuasaan berhubungan dengan seseorang yang menjadi pemimpin dalam sebuah pemerintahan. Apakah ia mendapatkan kekuasaan tersebut berdasarkan asal-usul kelahiran, kekerasan dan paksaan atau pilihan masyarakat? Hal yang disebutkan terakhir merupakan cara demokratik dari mana sumber kekuasaan diperoleh. *Kedua*, tujuan aktivitas pemerintah. Jika pemerintah hanya melayani dan bekerja untuk sekumpulan, golongan atau sebuah partai, maka dapat dipastikan sistem pemerintahan yang berlangsung bukanlah sistem politik yang demokratik. *Ketiga*, prosedur yang dijalankan oleh pemerintah, berkait erat dengan sejauh mana sistem pemilihan umum dilaksanakan secara rutin, bebas, adil, media yang tidak disekat dan lainnya.

² Tilly (2007:7-9) menyatakan perlembagaan ini terkait dengan pemerintahan (yaitu perlembagaan amat menentukan apakah pemerintahan tersebut berwajah monarki konstitusional, sistem presidensial atau lainnya); kedua, substansi, menumpukan kepada apa yang dipromosikan pemerintah terhadap masya-

logi di atas, kemudian muncul pelbagai label demokrasi yang diidentifikasi oleh Collier & Levitsky (1997:431)—lebih dari 550 sub-jenis semuanya, baik yang bersifat liberal maupun terbatas (demokrasi tidak liberal).³ Namun persoalannya, dari banyak istilah dan definisi yang telah diberikan oleh banyak sarjana, apakah karakteristik utama demokrasi yang dapat menyatukan pelbagai definisi tersebut?

Untuk mendapatkan takrifan yang mudah dipahami, maka sepatutnya penerokaan definisi tersebut dimulai dengan memahami demokrasi dari aspek etimologi. Demokrasi berasal daripada perkataan Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* (*cratin*) bermaksud kekuasaan atau pemerintahan (Dahl 1989:3; Lane & Ersson 2003:25). Gabungan kedua perkataan—*demos-kratia*—dapatlah dimaknai sebagai pemerintahan oleh rakyat (*rule by the people*). Merujuk pada maksud 'oleh rakyat,' kedaulatan

dalam memerintah tidak lagi berada pada tangan raja, seorang pemerintah tirani ataupun diktator perseorangan maupun sekumpulan kecil orang (oligarki). Ini karena maksud 'oleh rakyat' adalah seluruh warganegara.

Kembali kepada konsep demokrasi, merujuk pada beberapa sarjana, Barker (1942:315) misalnya mendefinisikan demokrasi sebagai, "... does not mean the well being or prosperity of the people, but a method of government of the people." Schumpeter (1947:269) juga menegaskan demokrasi adalah, "... institutional arrangement for arriving at political decision in which individuals acquire the power to decide by means of competitive struggle for the people's vote." Demokrasi juga dimaknai oleh Bobbio (1987:19) sebagai, "... a set of procedural rules for arriving at collective decisions in a way which accommodates and facilitates the fullest possible participation of interested parties."

Ketiga definisi di atas secara garis besar menjelaskan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana formulasi kebijakan publik—yang terkait erat dengan kelangsungan hidup warganegara, secara langsung atau tidak (langsung), amat ditentukan oleh suara mayoritas warga masyarakat yang memiliki hak pilih melalui wadah pemilihan.⁴

rakyatnya, misalnya seperti kebebasan individu, partisipasi politik masyarakat yang nyata, keadilan, keamanan dan lainnya; ketiga, prosedural, dikaitkan dengan ada atau tidaknya persaingan dalam sistem multiparti, kebebasan untuk ikut serta secara aktif dalam pemilihan umum (baik dalam konteks aktor individual maupun kelompok/partai), institusi demokrasi dan lain-lain; dan keempat, orientasi proses yang mensyaratkan partisipasi yang efektif, kesamaan hak untuk memilih, kemampuan untuk mengawal agenda pemerintah dan beberapa lagi lainnya.

³Antara subjenis demokrasi yang disenarai oleh Collier & Levitsky (1997) ialah demokrasi elektoral, protodemokrasi, neopatrimonial demokrasi, demokrasi yang didominasi tentera dan masih banyak lagi lainnya. Sebagai bahan perbandingan, rujuk kajian klasik Held (1987).

⁴Definisi para sarjana diatas, menurut pendapat penulis lebih kurang sama dengan argumen yang diutarakan oleh Lipset (1959). Menurutnya, demokrasi adalah: "... a political system which supplies regular

Mengikuti kerangka di atas, Dahl dalam bukunya *Polyarchy* (1971), menyempurnakan konsep demokrasi dengan cara membuat kriteria ke atas sistem politik demokrasi. Menurutnya, terdapat tiga kriteria negara demokrasi: *pertama*, persamaan hak dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; *kedua*, partisipasi efektif (yaitu kesempatan yang sama bagi seluruh warganegara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif); dan *ketiga*, wujudnya tingkat kebebasan sipil dan politik (Dahl 1971:2). Sehubungan dengan kriteria ini, demokrasi dapat dipandang sebagai pemerintah yang dikendalikan oleh rakyat. Kendali ini sampai pada kadar tertentu tergantung pada partisipasi politik rakyat. Malah, dalam sebuah negara demokrasi, keutamaan ataupun keperluan rakyat adalah berbeda-beda satu sama

constitutional opportunities for changing the governing officials, and a social mechanism which permits the largest possible part of the population to influence major decisions by choosing among contenders for political office." (Lipset 1959:71). Beda penjelasan Lipset dengan definisi sebelumnya ialah, Lipset mengetengahkan persyaratan berlangsungnya pergantian pemerintahan secara rutin. Pergantian kekuasaan dalam sistem politik yang tidak demokratik akan selalu melalui mekanisme yang tradisional ataupun paksaan. Pergantian kekuasaan melalui cara tradisional—keturunandarah—tentu saja tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menentukan pemimpin yang dikehendaki mereka. Ini karena pemilihan pemimpin (secara tradisional hanya melalui kaedah turun-temurun. Demikian pula halnya dengan pergantian kekuasaan dengan cara paksaan. Kudeta, revolusi dan demonstrasi yang berakhir dengan kejatuhan pemerintah menunjukkan bagaimana politik dijalankan secara yang tidak beradab dan tidak demokratik.

lainnya, dan bahkan bisa saling berseberangan. Keperluan dan keutamaan masyarakat yang berbeda-beda ini membuat demokrasi menjadi sebuah bentuk pemerintahan yang fleksibel; singkatnya, demokrasi bersifat inklusif dan terbuka terhadap pelbagai tuntutan.

Dengan demikian, sistem politik demokrasi bergantung kepada ada atau tidaknya beberapa ciri berikut: (i) kebebasan membentuk dan bergabung ke dalam organisasi (socio-politik), (ii) kebebasan mengeluarkan pendapat, (iii) hak untuk memilih, (iv) hak bagi pimpinan politik untuk dipilih maupun memilih, (v) kebebasan mendapat informasi alternatif dan (vi) pemilihan umum yang bebas dan adil. Dengan demikian menurut definisi ini, perbezaan antara negara demokrasi dengan yang bukan ditentukan oleh berlaku atau tidaknya kompetisi (*competition*) dan kebebasan memilih (*inclusive suffrage*) (Dahl 1971:4).⁵ Argumen Dahl (mengenai kebebasan) sejalan dengan analisis Lipset (1994:3) yang menulis, "*the acceptance by the citizenry and*

⁵Definisi Dahl (1971) di atas sama saja dengan yang ditawarkan oleh Doorenspleet (2006), di mana demokrasi identik dengan kompetisi dan partisipasi. Beliau menyatakan, "*Democracy is a type of political regime in which (1) there exist institutions and procedures through which citizens can express effective preference about alternative policies at the national level, and there are institutionalized constraints on the exercise of power by the executive (competition); and (2) there exists inclusive suffrage or the right of participation in selecting national leaders and policies (inclusiveness/participation)*" (Doorenspleet 2006:15).

political elites of principles underlying freedom of speech, assembly, religion, ... and the like." Bagaimanapun, kebebasan ini baru (akan) berlaku jika masyarakat bersikap toleran terhadap paham dan ideologi yang berbeda. Ini karena kebebasan dalam demokrasi mensyaratkan bahwa rakyat perlu bersikap terbuka terhadap perbedaan dan setuju untuk tidak setuju. Warga boleh membenci antara satu sama lain selama sikap itu tidak menghalangi hak orang lain (Sullivan, Piereson & Marcus 1982:6). Seorang sosialis misalnya, boleh membenci seorang kapitalis, tetapi mereka hanya boleh dianggap intoleran apabila seorang sosialis itu menghalang kapitalis untuk menjalankan kehendaknya—baik menjadi usahawan, menjadi pegawai negeri, menjadi pembela atau pejuang paham kapitalisnya ataupun sebagainya.

Paradigma Dahl mengenai demokrasi merupakan tolak ukur yang digunakan oleh para sarjana untuk menilai sejauh mana sebuah sistem politik bersifat demokrasi atau sebaliknya. Sebagai contoh, suatu sistem politik yang menolak pelibatan masyarakat untuk memilih (dalam pemilihan umum, Pemilu) dapat dikatakan sebagai tidak demokratik. Ini misalnya pernah terjadi di Afrika Selatan apabila 70% penduduk berkulit hitam dilarang memilih dalam Pemilu, di Switzerland (Swiss) terhadap 50% penduduknya yang wanita, atau seperti di Amerika Serikat (AS) terhadap 10% penduduknya yang

berkulit hitam di bagian Selatan (Huntington 1991b:7). Pada masa Orde Baru berkuasa, pengawasan dan pengendalian masyarakat juga turut dilakukan. Misalnya, rejim Orde Baru mengimplementasikan Peraturan Menteri (Permen) yang melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi anggota partai politik manapun. Untuk memperkokoh Permen tersebut, diformulasi Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1970 (PP. No. 6/1970), yang menetapkan bahwa seluruh PNS mesti setia kepada negara dengan cara memilih Golongan Karya (Golkar) dalam setiap Pemilu. Untuk memastikan peraturan tersebut dipatuhi, pemerintah melakukan pengendalian melalui pembatasan ataupun penjatuhan sanksi kerja kepada seorang pegawai yang tidak patuh terhadap aturan tersebut. Akibatnya, Pemilu Orde Baru menjadi tidak bebas. Karena itulah, dalam masyarakat manapun, tidak terkecuali Indonesia, kegagalan terus-menerus partai oposisi untuk memenangi kursi menimbulkan pertanyaan: apakah Pemilu yang diselenggarakan berjalan bebas dan adil atau sebaliknya?

Perdebatan mengenai definisi demokrasi tidak berhenti sampai di sini—pada perkara kebebasan memilih dan persaingan yang adil saja. Faktor lain yang ikut diperdebatkan ialah mengenai akuntabilitas pemerintah. Merujuk pada definisi Schmitter & Karl (1991:76), sistem demokrasi modern adalah, "... a system of governance in which

rulers are held accountable for their actions in the public realm by citizens, acting indirectly through the competition and cooperation of their elected representative."⁶ Dalam arti kata lain, pemerintah yang demokrasi bukan hanya soal mendapatkan dukungan melalui Pemilu semata, tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana aktivitasnya dilaksanakan secara bertanggungjawab atas pelbagai kegiatan ke pemerintahannya.⁷ Sebagai con-

⁶ Takrifan demokrasi yang mempunyai nada serupa dengan Schmitter & Karl (1991) dan beberapa sarjana sebelumnya, diungkap pula oleh Vanhanen (2003:49) sebagai berikut, "...political system in which ideologically and socially different groups are legally entitled to compete for political power and in which institutional power holders are elected by the people and are responsible to the people".

⁷ Tulisan Schmitter & Karl (1991) mengenai demokrasi, *What democracy is ... and is not?* juga meneroka persepsi masyarakat yang salah mengenai demokrasi. *Pertama*, masyarakat acap kali memahami rejim nondemokratik lebih efisien dalam mengurus dan menggerakkan ekonomi negara dibandingkan dengan rejim lainnya, khususnya pada masa transisi yang turbulens. Pada masa transisi tersebut, menurut mereka, pengelolaan dan pengendalian ekonomi lebih mudah dijalankan baik oleh rejim otokratik ataupun diktator yang nondemokratik. *Kedua*, demokrasi tidak selalu lebih efisien dalam bidang administrasi publik. Realita ini bisa dilihat ketika proses pembuatan keputusan (*decision-making process*). Dalam rejim demokrasi, para aktor berusaha untuk menimbang pelbagai masukan kebijakan dari setiap pihak (etnik, ras, kelompok agama dan lainnya). Tujuannya untuk menentukan apakah formulasi kebijakan yang sedang atau akan dibuat bisa memenuhi kepentingan bersama atau sebaliknya. Sedangkan dalam rejim nondemokratik, perundingan tidak pernah dilakukan agar kebijakan mudah disahkan dan diimpleemntasikan. *Ketiga*, demokrasi tidak selalu terkait erat dengan terciptanya stabilitas politik, konsesus ataupun lainnya. Sebab, jika dihubungkan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat, maka tidak ada jaminan bahawa kestabilan dan konsensus antaretnik, antaragama dan lainnya, dapat dengan mudah dilaksanakan. *Kemempat*, demokrasi membuka kesempatan luas bagi

toh, suatu pemerintahan dikatakan tidak demokratik apabila menyekat masyarakat mencari dan mendapatkan informasi (yang benar), tanpa alasan yang jelas. Perilaku pemerintah menyekat ataupun mengendalikan (sumber) berita seperti ini jelas tidak bertanggungjawab karena hal ini dapat membuat pihak pemerintah memanipulasi berita yang benar demi kepentingan rejim. Sikap pemerintah yang sebegini dapat membawa rejim ke arah otoritarianisme, dan hal ini banyak terjadi di beberapa negara berkembang. Misalnya, menyitir kajian Hilley (2001:136-139) yang menunjukkan sekatan dan pengendalian terhadap media (massa) dilakukan sangat penetratif oleh negara di Malaysia. Pelbagai mekanisme digunakan oleh pemerintah Malaysia untuk mengawal berita atau informasi yang sesungguhnya agar tidak terkuak dalam ruang publik (*public sphere*) karena keterbukaan informasi dapat mengganggu stabilitas dan *status quo* rejim berkuasa. Lanjutnya, instrumen utama dalam mengawal media massa ada beberapa. Pertama, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan (1984) dan Akta Penyiaran (1998). Semua penerbitan di Malaysia diwajibkan untuk memohon dan memiliki permit tahunan yang bisa dibatalkan (oleh

masyarakat untuk berpolitik, tetapi tidak selalu terbuka untuk perihal ekonomi. Pada era transisi, pemerintah sering kali melakukan kebijakan perlindungan demi menyelamatkan ekonomi rakyat, tetapi dalam jangka panjang, keterbukaan ekonomi merupakan janji demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan politik yang telah dilaksanakan.

pemerintah) jika pemohonannya bertentangan dengan kepentingan nasional. Cara kedua adalah pemusatan pemilikan media oleh negara ataupun kroni.⁸

Cara ketiga ialah dengan memainkan slogan “kewartawanan pembangunan yang bertanggungjawab”. Dalam hal ini, wartawan “diarahkan”—jikapun tidak dikerahkan—untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam hal pemberitaan.

Sekatan dan pengendalian terhadap media massa juga terjadi di Indonesia pada masa rejim Orde Baru berkuasa. Dengan pelbagai cara yang lebih kurang sama dengan yang berlangsung di Malaysia, rejim Orde Baru mengontrol dan mengendalikan berita. Pada masa itu beberapa majalah yang kritikal, salah satunya *Tempo*, dibatalkan ijin penerbitannya (bere-del) karena terlalu keras mengkritik kebijakan pemerintah (Lane 2008). Negara Orde Baru Soeharto tidak hanya mengawal media massa bahkan beberapa buku dilarang penerbitannya, baik buku terjemahan maupun karya penulis lokal. Antaranya, semua karya Pramodya Ananta Toer—tokoh Lembaga Kesenian

Rakyat (Lekra), organisasi binaan PKI, termasuk tetraloginya (*Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca*); analisis mendalam tentang peristiwa 30 September 1965 karya Anderson & McVey yang bertajuk *A preliminary analysis of the October 1, 1965, coup in Indonesia* (1971); terjemahan tesis doktor Yahya A. Muhaimin dari Massachusetts Institute Technology (MIT) yang berjudul *Bisnis dan politik* (1990); *Kapitalisme semu di Asia Tenggara* (1991) buku terjemahan hasil karya Yoshihara Kunio; dan banyak lagi lainnya adalah sebagian kecil dari banyak buku yang dilarang oleh pemerintah Orde Baru.

Melihat ciri sistem politik demokrasi yang diuraikan Dahl di atas, persoalan yang muncul ialah apakah hanya Dahl saja yang mensyaratkan sifat tertentu kepada sebuah pemerintahan yang demokratik? Tentu saja tidak. Ada banyak sarjana lain yang menetapkan ciri pemerintahan demokratik. Antaranya Diamond *et al.* (1995), Przeworski *et al.* (2000), Diamond (2003)—hanya sekadar menyebut beberapa nama sahaja, dan juga beberapa lembaga kajian seperti Freedom House (FH) di bawah arahan Raymond D. Gastil (sarjana politik asal AS).⁹

⁸Kebanyakan media di Malaysia dikontrol oleh beberapa perusahaan milik United Malays National Organisation (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA) dan Malaysian Indian Congress (MIC), di samping pengusaha besar lain yang bekerjasama secara intens dengan Barisan Nasional (BN). Lihat juga Gomez & Jomo (1997) untuk perbincangan lebih lanjut.

⁹Diamond *et al.* (1995:6-9) menjelaskan bahawa batasan antara rejim demokratik dan tidak demokratik (*undemocratic*) amat samar dan tidak sempurna apalagi jika dioperasionalkan ke dalam contoh kasus. Karena itulah, mereka mengkategorikan rejim tidak demokratik sebagai semidemokrasi, demokrasi

Pada tahun 1999, Dahl menerbitkan buku *On Democracy*. Dalam buku tersebut, beliau mendiskusikan dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substansial (substantif).¹⁰ Demokrasi yang disebut-

dengan kualitas rendah, sistem kepartaian yang hegemonik, pseudodemokrasi dan rejim totalitarian. Untuk membedakan antara kelima rejim dengan sistem politik demokratik, Diamond et al. (1995) menetapkan tiga ciri dasar, yakni: (i) persaingan yang luas dan bermakna, (ii) partisipasi politik yang sangat inklusif dan (iii) kebebasan sipil untuk berpolitik secara adil yang dijaga oleh aturan undang-undang. Kajian Diamond (2003:7-17) menyempurnakan pengkategorian rejim yang telah dibuat oleh Diamond et al. (1995), sebagai berikut: demokrasi liberal, demokrasi elektoral, demokrasi, pseudodemokrasi dan non-demokrasi. Menurut Diamond (2003), pengkategorian ini dibuat berdasarkan kriteria berikut: (i) kebebasan sipil, (ii) partisipasi dan (iii) adanya oposisi. Cara pandang yang lebih kurang sama disampaikan pula oleh Przeworski et al. (2000:14-36). Menurut mereka ada tiga tolak ukur untuk menentukan sebuah rejim dikatakan demokratik atau tidak, yaitu: (i) pemimpin lembaga eksekutif mesti dipilih, (ii) legislatif mesti dipilih dan (iii) mesti ada lebih dari satu partai (yang bersaing dalam pemilihan umum). Dalam perspektif ini, Przeworski et al. (2000) memfokuskan perhatian pada pemilihan umum sebagai jati diri demokrasi. Sejalan dengan beberapa argumen di atas, Freedom House (FH)—sebuah lembaga kajian politik di level internasional—yang meneliti mengenai tahap demokrasi di banyak negara juga menetapkan ciri sebuah rejim yang terbuka (free) berdasar pada indeks kebebasan sipil (*civil liberties*) dan hak politik (*political rights*). Dari kedua variabel yang dikembangkan FH, mereka kemudian mengembangkan ke dalam 14 indikator operasional. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai indeks dan beberapa indikator tersebut, lihat www.freedomhouse.org. Sedangkan, Polity Project (PP) menyifatkan rejim demokrasi dengan beberapa ciri; antaranya ialah: (i) persaingan dalam partisipasi politik, (ii) persaingan dalam merekrut pemimpin eksekutif, (iii) keterbukaan dalam rekrutmen pemimpin-pemimpin eksekutif, (iv) pembatasan (masa berkuasa) terhadap pemimpin eksekutif, (v) aturan dalam menyelenggarakan kompetisi politik, (vi) aturan dalam partisipasi politik dan lainnya.

¹⁰Secara umum, kajian Dahl mengenai demokrasi prosedural dan demokrasi substansial adalah sama

kan pertama, merujuk Dahl, adalah suatu sistem politik yang menjalankan ciri demokrasi secara terbatas. Dalam arti kata lain, demokrasi prosedural tetap mengakui berlakunya kebebasan berbicara, kebebasan media, kebebasan berkumpul dan lainnya, tetapi hanya pada tingkat yang 'diizin' oleh pemerintah saja. Oleh sebab itu, Dahl (1999) menerangkan demokrasi jenis ini walaupun (tetap) menyelenggarakan Pemilu, tetapi ia bukan untuk meningkatkan kualitas proses pemilihan, otonomi pemilih, transparansi pemerintah dan lainnya, sebab yang dijalankan dalam konteks ini hanyalah prosedur(-prosedur) demokrasi semata.

Manakala, demokrasi substansial menumpukan kepada kualitas kebebasan sipil (*civil liberties*) dan kualitas hak politik (*political rights*). Lebih lanjut Dahl menjelaskan, kualitas demokrasi substantif setidaknya mempunyai empat ciri, yaitu: (i)

dengan kajian Zakaria (2005). Dalam elaborasi Zakaria, demokrasi prosedural disebutnya dengan istilah *illiberal democracy*, sedangkan demokrasi substansial disebutnya sebagai *liberal democracy*. *Illiberal democracy* dalam pandangan Zakaria adalah suatu bentuk demokrasi yang mengabaikan kebebasan. Dalam buku tersebut Zakaria mengungkapkan banyak contoh demokrasi yang menindas kebebasan, termasuk di AS sendiri. Menurutnya, sistem politik AS walaupun tidak membawa dampak buruk secara langsung, kekuasaan tidak berada di tangan rakyat, tetapi dipegang oleh partai dan lembaga negara seperti presiden, parlemen dan senat. Kendati rakyat memilih wakil-wakil mereka, namun rakyat tidak terlibat secara langsung dalam proses politik, sehingga akibat jangka panjang (yang diterima rakyat AS) adalah terbentuknya berbagai kebijakan publik yang 'disandera' oleh kelompok kepentingan.

kendali terhadap negara termasuklah kekuasaan tentara berada di bawah kekuatan sipil, (ii) kekuasaan eksekutif dibatasi oleh konstistusi dan kekuasaan institusi pemerintah lainnya, (iii) tidak melarang kelompok minoritas untuk mengungkapkan kepentingan dan keperluan mereka dan (iv) setiap rakyat memiliki kedaulatan yang setara di hadapan lembaga peradilan. Jika diilustrasikan dan disederhanakan, maka kedua model demokrasi yang dianalisis oleh Dahl tersebut, pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Demokrasi prosedural sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana Demokrasi Pancasila (1966-1998) berperilaku, sedangkan demokrasi substansial lebih sesuai dikaitkan dengan demokrasi Orde Reformasi seperti sekarang ini. Sebab Demokrasi Pancasila selalu menyelenggarakan Pemilu secara berkala setiap lima tahun seperti yang disyaratkan undang-undang, namun malangnya, semua penyelenggaraan pemilihan tersebut tidak ditujukan untuk mengembangkan jati diri demokrasi, tetapi lebih ditujukan untuk melegitimasi rejim yang berkuasa.

Di luar itu semua, yang patut dibahasakan pula mengenai demokrasi ialah ia mesti dipahami dalam konteks negara-bangsa sebab tidak ada demokrasi tanpa negara-bangsa (Linz & Stephan 1996). Hubungan penting antara demokrasi dan negara-bangsa terletak pada keperluan pemerintah yang memerintah untuk menegakkan hukum dan mengendalikan wilayah

kekuasaannya. Dan, negara merupakan satu-satunya institusi yang dapat melakukan pemaksaan secara sah bagi tujuan tersebut. Justeru itulah, tanpa negara yang berfungsi menegakkan tatanan hukum dan ketertiban, demokrasi menjadi tidak mungkin. Selain itu, demokrasi juga perlu disuburkan dengan sikap dan perilaku seluruh lapisan masyarakat untuk menyokong tumbuh suburnya demokrasi.

Persoalannya, bagaimana itu dilaksanakan? Dalam *Making democracy work* (1993:167), Putnam menyebut sikap saling percaya antara sesama warga, norma hubungan timbal-balik antarwarga (*reciprocity*), dan jaringan keterlibatan dalam kehidupan sesama warga (*network of civic engagement*) merupakan modal memperkuat demokrasi. Sikap saling percaya antara sesama warga sangat penting bagi konsolidasi demokrasi karena ia dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam interaksi antara warga dan dapat mengurangi biaya transaksi sosial. Artinya, demokrasi tidak dapat berjalan stabil dan efektif jika rasa percaya antara sesama warga, khususnya di kalangan elit politik tidak ada. Argumen Putnam (1993) senada dengan kajian Warren (1999:4) yang menulis bahwa demokrasi memerlukan koordinasi dan aksi kolektif yang diwujudkan oleh rasa saling percaya antara masyarakat, baik di tingkat elit ataupun massa. Demokrasi dikelola di atas bangunan masyarakat yang kompleks

dan beragam. Dalam masyarakat seperti itu, kerjasama sukar dibangun jika semata-mata hanya berdasarkan pada pengetahuan, informasi dan pertimbangan rasional saja. Oleh karena itulah, sikap saling percaya sangat penting dalam membantu mengatasi masalah ini (Warren 1999:5).

Merujuk pada berbagai definisi, ciri dan dialektika demokrasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa (paling tidak) demokrasi bisa dipahami dalam beberapa skema makna, yaitu: (i) suatu rejim politik yang menyertakan rakyat untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan wakil rakyat (baik anggota parlemen ataupun pemimpin eksekutif) melalui sistem pemilihan umum yang adil, inklusif, transparan dan berkala; (ii) wujudnya penegakan hukum yang adil; (iii) pemerintah menghormati dan merealisasikan kesejatian kebebasan sipil dan hak politik rakyat; dan (iv) wujudnya mekanisme pertanggungjawaban dan akuntabilitas pemerintah.

Demokratisasi: Anjakan Menuju Demokrasi

Pendemokrasian atau proses demokratisasi merupakan transisi menuju demokrasi yang bermuara kembar. Ini karena demokratisasi merupakan sebuah proses 'menuju,' bukan 'menjadi.' Sekiranya proses ini tidak dikelola dengan baik, maka transisi ini bisa sangat mungkin berlabuh kepada sistem politik yang tidak demokratik.

Sebagai sebuah proses 'menuju,' pendemokrasian tidak jarang memakan korban, khususnya pada zaman konsolidasi demokrasi. Negara-negara yang tidak mengawal proses transisi menuju demokrasi secara baik—termasuk pada tempo konsolidasi—acapkali terpeleset dan kembali kepada kubangan otoritarianisme.¹¹ Namun demikian, merujuk pada argumen Huntington (1991b) dan Doorenspleet (2006) bahwa proses menuju demokrasi merupakan suatu fenomena politik baru.

Sebagai sebuah fenomena politik yang baru bermula pada awal abad ke-19, demokratisasi telah memunculkan kesan gelombang perubahan ke arah demokrasi yang luar biasa termasuk gelombang baliknya (Huntington 1991b:31). Dalam sejarahnya,

¹¹ Beberapa negara yang coba melakukan proses demokratisasi, namun gagal. Contohnya ialah: (i) Fiji, walaupun sudah sepuluh tahun (dari tahun 1990 hingga tahun 2000) dilaksanakan, tetapi akhirnya negara ini kembali kepada rejim yang otokratik; (ii) Albania, setelah proses pendemokrasian yang melelahkan pada tahun 1992, akhirnya negara ini kembali kepada rejim otokratik pada tahun 1997; (iii) Kepulauan Comoros kembali pada rejim otokratik pada tahun 1999, di mana sebelumnya telah berupaya melakukan transformasi politik pada tahun 1990, (iv) Congo-Brazzaville, demokratisasi pada tahun 1992 terhenti dan kembali lagi ke dalam rejim nondemokrasi pada tahun 1997; (v) Sierra-Leone, demokrasi yang hanya mampu bertahan satu tahun (1996-1997), namun berakhir dengan kembalinya rejim otokrasi pada tahun 1997; dan banyak lagi. Salah satu penyebab kembalinya rejim nondemokrasi di beberapa negara di atas adalah ketidaksabaran (elit maupun massa) untuk menjalani proses demokratisasi itu sendiri. Rujuk Huntington (1991b), Remmer (1991), Keen (2005) dan Doorenspleet (2006), untuk bahasan lebih lanjut mengenai kegagalan demokratisasi.

peristiwa demokratisasi dan arus balik demokrasi kadang-kadang terjadi secara hampir serentak di beberapa negara. Umpamanya, gelombang pertama demokratisasi yang berakar pada Revolusi Perancis dan Revolusi AS, mendorong munculnya negara (yang relatif) demokratik dengan mengikut dua kriteria yang membedakannya dengan negara bukan demokrasi, iaitu: (i) 50% lelaki dewasa berhak memberikan suara dalam pemilihan umum dan (ii) adanya seorang pemimpin eksekutif yang bertanggungjawab mempertahankan sokongan majoritas dalam suatu parlemen yang dipilih dalam pemilihan umum yang berkala. Dengan merujuk serta menggunakan kriteria tersebut, maka Huntington (1991b:16) mengatakan bahwa gelombang demokratisasi pertama yang berlangsung antara tahun 1828 hingga 1926 melahirkan beberapa negara demokrasi baru antaranya seperti Switzerland, Perancis, Inggris dan beberapa negara kecil lainnya. Bahkan menjelang Perang Dunia I, Italia dan Argentina bergerak ke arah rejim demokrasi. Selepas PD I, Irlandia dan Iceland yang baru merdeka turut juga menjadi bagian dari liga negara demokrasi baru tersebut.

Namun malangnya, pada tempo yang sama—sebelum dan setelah PD I—proses pembalikan demokratisasi terjadi (antara tahun 1922 hingga tahun 1942) (Huntington 1991b:17; Doorenspleet 2006:40, 46). Beberapa negara yang mengalami proses

arus balik tersebut ialah Bulgaria, Greece, Italia, Lithuania, Polandia, Spanyol, Yugoslavia dan banyak lagi. Di Amerika Latin, perebutan kekuasaan oleh rejim militer di Brazil dan Argentina pada tahun 1930 membawa negara tersebut kepada sistem non-demokrasi. Uruguay yang mulai membangun sistem politik demokratisnya dipaksa kembali kepada rejim otoritarian pada tahun 1933.¹² Anjakan dari rejim demokrasi ke rejim nondemokrasi mencerminkan bangkitnya beberapa ideologi popular ketika itu, seperti komunisme, fasisme dan militerisme. Akibatnya Perancis, Inggris dan negara lain yang telah menubuhkan institusi demokrasi mendapat goncangan dari gerakan antidemokrasi yang memperoleh kekuatan akibat depresi pada tahun 1930-an.

Merujuk kajian Huntington (1991b) dan juga Doorenspleet (2006), ketiga gelombang demokratisasi telah berlaku selama dua abad terakhir.¹³ Masing-masing gelombang

¹² Terjadinya gelombang balik demokratisasi karena berlaku depresi ekonomi dunia yang sangat buruk. Insiden ini dipahami oleh banyak orang sebagai akibat dari praktik liberalisme—yang juga identik dengan demokrasi. Selain itu, muncul pula wacana tandingan demokrasi seperti komunisme dan fasisme sebagai model jalan keluar dari depresi ekonomi dunia yang edang berkecamuk. Rujuk Huntington (1991b), Haggard & Kaufman (1995) dan Diamond (2003) untuk uraian lebih lanjut mengenai hal ini.

¹³ Merujuk Doorenspleet (2006:48), proses demokratisasi ini bahkan berlangsung terus-menerus hingga abad ke-21 yang disebutnya sebagai gelombang demokratisasi keempat. Gelombang demokratisasi ini, berlangsung antara tahun 1989 hingga tahun 2001

telah berhasil mempengaruhi beberapa rejim untuk bergerak dari sistem politik otokratik kepada sistem demokratik. Tetapi, masing-masing gelombang itu pula telah mendorong beberapa transisi menuju pembalikan demokrasi. Apabila merujuk pada kajian Huntington (1991b:16), maka sejarah demokratisasi bukanlah sesuatu yang teratur (lihat Tabel 1). Maksudnya, pengkategorian tahun-tahun atas perubahan politik tidak dapat dituliskan secara berkesinambungan karena sejarah bukanlah sesuatu yang teratur dan perubahan politik tidak dapat dipilih secara rapi dalam kategori waktu.

Uraian singkat di atas membawa penulis kepada beberapa persoalan penting: apa itu demokratisasi, mengapa ia berlaku, faktor apa yang mendorong terjadinya proses pendemokrasian dan bagaimana proses itu berlaku? Selain itu, jika memang demokratisasi adalah sebuah 'gelombang,' maka mengapa proses pendemokrasian tidak menerpa semua negara non-demokrasi? Juga, mengapa perubahan-perubahan rejim terjadi pada rentang 1970-an hingga 1990-an, bukan pada rentang waktu lainnya? Rangkaian persoalan tersebut menjadi penting untuk memaha-

yang merupakan kelanjutan gelombang demokratisasi ketiga (1974-1989). Paling tidak terdapat 47 negara yang berpotensi menuju demokrasi pada tempo tersebut; antaranya ialah Polandia (1989), Nicaragua (1990), Bangladesh (1991), Guyana (1992), Lesotho (1993), Afrika Selatan (1994), Sierra-Leone (1996), Albania (1997), Indonesia (1998), Nigeria (1999), Croatia (2000) dan beberapa negara lainnya.

mi bagaimana kepelbagaian mengenai demokratisasi akan dan boleh berlaku, baik di tingkat internasional ataupun di tingkat regional.

Sebelum berdialektika lebih jauh, artikel ini terlebih dahulu membahas mengenai apa itu demokratisasi? Jika merujuk pada beberapa sarjana transitologis—sebutan bagi pengamat yang menumpukan perhatiannya pada proses transisi menuju demokrasi, pendemokrasian didefinisikan sebagai proses beralihnya rejim non-demokrasi menuju rejim demokrasi dalam kurun waktu tertentu (Uhlin 2002:185). Karena itu, demokrasi berbeda dengan demokratisasi. Jika demokrasi menjelaskan mengenai keadaan sebuah rejim dengan pelbagai karakteristik yang membentuknya, maka demokratisasi lebih mengarah pada anjakan atau pergerakan dari sebuah sistem politik yang belum demokratik kepada suatu sistem politik yang demokratik. Karenanya, proses pendemokrasian dalam artikel ini dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh para aktor politik (baik individu atau kelompok, berorganisasi ataupun tidak, berasal dari dalam rejim ataupun luar rejim, menggunakan tekanan atau bujukan dan dalam tempo cepat ataupun perlahan) untuk mengakhiri sistem politik nondemokrasi dan kemudian membina sistem politik yang demokratik.

Tetapi masalahnya, mengapa sejumlah rejim nondemokrasi dapat

Tabel 1 Proses Demokratisasi Dan Arus Balik Demokrasi

Gelombang Demokratisasi	Tahun
Gelombang pendemokrasian pertama	1828-1926
Gelombang balik pertama	1922-1942
Gelombang pendemokrasian kedua	1943-1962
Gelombang balik kedua	1958-1975
Gelombang pendemokrasian ketiga	1974-

Sumber: Huntington (1991b:16).

bergerak ke arah sistem politik yang demokrasi sedangkan yang lainnya tidak? Untuk menjelaskan hal ini beberapa sarjana, antaranya Huntington (1991a; 1991b), Diamond (1994a; 1994b; 2003), Diamond *et al.* (1995; 1999), Linz & Stepan (1996), Chehabi & Linz (1998), Geddes (1999) dan Brooker (2000) menyatakan bahwa negara non-demokrasi bukanlah rejim dengan satu wajah yang serupa. Ia merupakan sistem yang beraneka rupa dan boleh menjelma sebagai sistem satu partai (ataupun sistem partai hegemonik), rejim junta militer, diktator perorangan dan banyak lagi kategori lainnya, sehingga sukar memberikan karakter tersendiri pada masing-masing rejim. Dalam kategori setiap rejim tersebut, ada beberapa negara yang selama 15 tahun sejak tahun 1974 tidak melakukan pendemokrasian, contohnya China dan Vietnam—yang menganut sistem satu partai; Myanmar antara negara dengan rejim junta militer; dan Iraq, Cuba, Korea Utara antara negara diktator perorangan. Oleh sebab itu, peralihan dari sistem nondemokrasi ke sistem politik yang demokrasi amat tergantung kepada hakikat rejim itu

sendiri (Huntington 1991b:41; King & Kendall 2004:103).

Namun malangnya, hakikat rejim nondemokrasi itu sendiri tidak dapat menjelaskan mengapa sejumlah rejim beranjak kepada sistem demokrasi sedangkan yang lainnya tidak. Kendati demikian, setidaknya Huntington (1991b:41-43) menerangkan bahwa pergerakan ke arah rejim demokrasi dapat dipengaruhi oleh pola demokratisasi. Terdapat lima pola demokratisasi yang pernah berlaku dan boleh digunakan untuk memahami perubahan politik ke arah demokrasi, iaitu: (i) pola siklus (pusingan), (ii) mencuba untuk kedua kalinya, (iii) demokrasi terputus-putus, (iv) transisi langsung, dan (v) dekolonisasi.¹⁴

¹⁴ Bagi pola siklus (*cyclical pattern*), negara-negara yang mengalami pola ini berselang-seling menganut sistem politik demokratik dan nondemokratik. Pola ini sangat umum berlaku di Amerika Latin seperti Argentina, Brazil, Peru, Bolivia dan Ecuador. Pola yang sama juga pernah terjadi di Turki dan Nigeria. Pemerintahan di negara-negara ini cenderung berubah-ubah antara pemerintahan demokratik yang popular dengan rejim militer yang lebih konservatif. Ini karena pada masa rejim demokrasi berkuasa, radikalisme, korupsi dan kekacauan acap kali berlaku sehingga mencapai tingkat yang tidak dapat diterima oleh mayoritas warga yang menyebabkan kelompok militer melakukan penggulingan terhadap rejim demokrasi. Umumnya, rakyat merasa lega dan

Mengikuti pengalaman beberapa negara yang dihurai beranjak ke demo-

menyambut baik tindakan tersebut. Namun, biasanya juga setelah itu, koalisi yang mendukung rejim militer itu pecah dan tentara tidak lagi berhasil menangani masalah ekonomi secara efektif menyebabkan rakyat menolak rejim tentara juga. Untuk pola mencoba demokrasi untuk kedua kalinya (*second-try pattern*), demokrasi bukanlah hal yang baru. Kegagalan demokrasi pada tahap pertama (sangat mungkin) disebabkan karena tiadanya landasan sosiopolitik yang memadai untuk berdirinya rejim demokrasi yang stabil. Kemudian, dengan cara berbeda-beda, sejumlah negara seperti Jerman, Italia, Spanyol, Jepang, Venezuela dan Colombia, telah membangun sistem demokrasi yang cukup stabil dalam tempo (yang) kedua (gelombang demokratisasi kedua) setelah mengalami arus balik dalam upaya mereka sebelumnya. Pola ketiga ialah demokrasi terputus (*interrupted pattern*). Pola ini terjadi di negara di mana demokrasi telah dibina dalam kurun waktu yang lama. Namun, ketika kestabilan, polarisasi atau keadaan lain berkembang ke arah menjatuhkan sistem demokrasi, maka rejim tersebut beranjak—untuk sementara waktu—ke arah rejim nondemokrasi. Dalam dasarwarsa 1970-an, sistem demokrasi Uruguay dihentikan oleh para pemimpin yang dipilih melalui mekanisme demokratik dengan cara bekerjasama dengan tentara. Di Chile, sistem demokrasi dibekukan oleh para pemimpin militer yang menggulingkan sebuah rejim terpilih (secara demokratik). Tetapi, pengalaman panjang negara-negara itu terhadap demokrasi memustahilkan para pemimpin politik (yang menghentikan demokrasi) untuk meniadakan sama sekali amalan demokrasi dalam negaranya. Dalam banyak kasus, para pemimpin politik akhirnya dipaksa tunduk pada suatu bentuk pemilihan umum yang kemudiannya meruntuhkan rejim nondemokratik. Pola keempat ialah transisi langsung (*direct transition*) dari sistem otokrasi yang stabil kepada sistem demokrasi yang stabil. Negara-negara yang mengikuti pola ini antaranya ialah Rumania, Bulgaria dan beberapa lagi lainnya. Kelima adalah pola dekolonisasi (*decolonization pattern*). Pola ini biasanya terjadi di negara kecil bekas koloni Inggris yang mewariskan sistem demokrasi, dan peninggalan ini dijalankan secara konsekuen oleh negara koloni tersebut setelah mereka mencapai kemerdekaan. Negara yang masuk dalam kategori ini adalah Santa Lucia, Kepulauan Solomon dan Kiribati. Untuk memudahkan pemahaman mengenai pola pendemokrasian di atas, dapatlah disimbolkan sebagai berikut: A digunakan untuk mewakili rejim non-demokratik yang relatif stabil serta bertahan lama; B

krasi, sebanyak 23 daripada 29 negara yang telah menjadi demokratik antara tahun 1974-1990 sebelumnya pernah memiliki pengalaman dengan (sistem politik) demokrasi (Huntington 1991b:190-197).¹⁵

Bahkan dalam beberapa kasus, pengalaman itu telah lama berlaku; pada beberapa kasus yang lain, pengalaman itu berlangsung sebentar saja; dan pada beberapa kasus yang lain lagi, pengalaman itu telah lama berlaku dan berlangsung singkat. Bagaimana-pun, negara yang pada tahun 1974 menganut sistem otoriter dan tidak melakukan demokratisasi hingga tahun 1990 tidak memiliki pengalaman demokrasi sebelumnya. Jadi, dapat dirumuskan bahwa sebuah negara dengan pemerintahan otoriter akan hanya menjadi demokratik apabila negara itu pernah menganut sistem demokrasi. Namun, petunjuk lain yang agak bertentangan dengan rumusan di atas ialah menjelang tahun 1989, gelombang demokratisasi ketiga memasuki fase kedua dan mulai

mewakili rejim demokratik yang relatif stabil dan juga bertahan lama; a mewakili rejim nondemokratik yang kurang stabil dan berumur pendek; b mewakili rejim demokratik yang kurang stabil dan juga bertahan sebentar; maka kelima pola demokratisasi dapat diilustrasikan sebagai berikut (Huntington 1991b:43-44): (i) Siklus: a-b-a-b-a-b (ii) Menouba untuk kedua kalinya: A-b-a-B (iii) Demokrasi terputus: A-B-a-B (iv) Transisi langsung: A-B (v) Demoklonisasi: B/a-B.

¹⁵ Beberapa negara yang memiliki pengalaman demokrasi tersebut ialah Argentina, Chile, Czechoslovakia, Greece (Yunani), Hungary, Jerman Timur, Polandia, Portugal, Spanyol dan Uruguay. Untuk diskusi lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Huntington (1991b:170-179).

memberi kesan pada negara-negara yang belum memiliki pengalaman demokratisasi yang berarti seperti Bulgaria, Rumania, Uni Soviet, Mexico dan Taiwan (Doorenspleet 2006:48, 51, *passim*). Hal ini tentu melahirkan pertanyaan lain, apakah hanya warisan demokrasi saja yang menjadi modal terhadap lahirnya proses demokratisasi pada paruh kedua abad-20? Jika hanya warisan yang menjadi modal proses transformasi politik yang berlaku pada gelombang ketiga demokratisasi, maka bagaimana menjelaskan fenomena demokratisasi yang terjadi sesudahnya (antara tahun 1989 hingga 2010)?¹⁶

Faktor Pendorong dan Peranan Elit: Usaha Menjawab Mengapa Demokratisasi Terjadi?

Melandaskan argumen pada perbincangan di bagian sebelumnya dapatlah dikatakan bahwa bukan hanya akar sejarah yang dapat membang-

kitkan demokrasi di sesebuah negara. Tetapi ada beberapa faktor lain yang turut mendorong proses pendemokrasi di banyak negara selama periode 1974 hingga sekarang ini. Paling tidak, jika menyitir Huntington (1991b), Diamond (2003), Vanhanen (1990; 1997; 2003) dan Doorenspleets (2006)—lebih khusus lagi Huntington, terdapat lima faktor pendorong yang dapat menerangkan mengapa proses transformasi politik ke arah sistem pemerintahan yang demokrasi bisa berjalan (terutama dalam gelombang demokratisasi ketiga). Dan, faktor ini pulalah yang dapat menjelaskan bahwa bukan sekadar aset warisan yang dapat mentransformasi sebuah negara menuju sistem politik demokrasi.

Faktor pertama ialah semakin lemahnya legitimasi yang dimiliki oleh rejim nondemokrasi, akibat kegagalan ekonomi, kekalahan perang dan kenaikan harga minyak pada tahun 1973-1974 dan 1978-1979. Sebagai akibat melambungnya harga minyak pada awal tahun 1970-an, menurut Huntington (1991b), rejim otoriter menghadapi krisis ekonomi—inflasi yang meningkat, depresi berkepanjangan dan utang yang semakin besar. Oleh karena itulah, legitimasi rejim menjadi lemah. Jika merujuk pada kajian McCoy (1993) di Filipina, umpamanya, 90% minyak negara tersebut diperoleh dari hasil impor. Ketika krisis minyak berlaku, Marcos terpaksa meminjam uang dari badan-badan keuangan internasional (*Inter-*

¹⁶ Negara yang mengalami transisi menuju demokrasi antara tahun 1989 hingga 2001, antara lain ialah: Panama dan Polandia pada tahun 1989; Bulgaria, Kepulauan Comoros, Czechoslovakia, Guatemala, Haiti, Hungary, Nepal, Nicaragua dan Rumania pada tahun 1990; Bangladesh, Benin, Lithuania dan Zambia pada tahun 1991; Albania, Congo-Brazzaville, Guyana, Madagascar, Mali, Mongolia, Niger, Paraguay, Rusia, Taiwan dan Thailand pada tahun 1992; Guinea-Bissau, Haiti, Malawi, Mozambique dan Afrika Selatan pada tahun 1994; Guatemala dan Sierra-Leone pada tahun 1996; Armenia dan Indonesia pada tahun 1998; Croatia, Guinea-Bissau, Rusia, Senegal dan Yugoslavia pada tahun 2000; dan banyak lagi. Rujuk Vanhanen (1997; 2003) dan Doorenspleet (2006) untuk perbincangan lebih lanjut mengenai hal ini.

national Financial Institutions, IFI's). Beliau harus menukar lebih banyak sumber-sumber daya ekonominya dengan dollar AS untuk membeli minyak. Hasilnya dari tahun 1980 dan seterusnya, pendapatan per kapita di Filipina terus-menerus menurun. Implikasinya legitimasi Marcos semakin merosot dan akhirnya melecutkan *people power* pada tahun 1986.

Argumen di atas sejalan dengan kajian Haggard & Kaufman (1995:33-36). Merujuk mereka, krisis ekonomi dianggap sebagai variabel bebas penting yang mendahului kejatuhan rejim politik otokratik. Sebab, 27 kasus transisi menuju demokrasi yang berlaku di berbagai negara pada tempo 1970-an hingga 1990-an, 23 diantaranya adalah disebabkan oleh krisis ekonomi. Jika demikian, maka krisis ekonomi merupakan peristiwa penting yang membuka peluang politik (*political opportunities*) untuk terjadinya transformasi politik, di samping peristiwa lainnya seperti kalah perang, kematian pemimpin yang otokratik, kejayaan gerakan sosial-politik dan lainnya.

Sejajar dengan hal itu, kajian Gill (2000:8-42) menarik untuk dipetik, setidaknya ada lima skenario bagaimana krisis ekonomi mendorong perubahan rejim politik yang otokratik. *Pertama*, krisis ekonomi membuat rakyat mempersoalkan kemampuan rejim di bidang ekonomi dan ini secara tidak langsung menggugat legiti-

masi dan keabsahan pemerintah. *Kedua*, kesukaran ekonomi menumbuhkan krisis kebijakan yang bisa membawa kepada perpecahan rejim. *Ketiga*, kesukaran ekonomi dapat merusak hubungan baik antara rejim dan pengusaha sehingga menyukarkan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi. *Keempat*, kesan dari legitimasi yang terus digugat menyebabkan kemerosotan kinerja ekonomi dan berkorelasi dengan kelangsungan kekuasaan rejim. Dan, *kelima*, munculnya krisis kepercayaan di kalangan sesama elit penguasa sehingga mendorong berlakunya transformasi politik.

Faktor kedua—pendorong proses pendemokrasian—ialah pertumbuhan ekonomi sejagat yang luar biasa pada tahun 1960-an telah mengakibatkan meningkatnya taraf hidup, pendidikan dan membesarnya kelas menengah; hal ini mendorong proses demokratisasi menjadi lebih mudah. Antara beberapa sarjana yang mendukung pendapat ini ialah Lipset (1963), Huntington (1991a; 1991b), Rueschemeyer *et al.* (1992), Haggard & Kaufman (1995), Cammack (1997), Barro (1999), dan masih banyak lagi. Dalam kajian Barro (1996) yang menyelidiki 100 negara, sebagai salah satu contoh, beliau menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung untuk mendorong proses pendemokrasian. Walaupun demikian, terdapat juga sarjana yang menentang argumen korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi.

Misalnya, Burkhart & Lewis-Back (1994:907):

On balance, it is clear that economic development substantially improves a nation's democratic prospects. However, the full magnitude of that effect depends on the location of the nation in the world system. As the nation moves from the core, to the semi periphery, to the periphery, the effect diminishes.

Analisis Burkhart & Lewis-Back (1994) itu didukung oleh kajian Przeworski *et al.* (2000) yang juga mengangkat isu demokrasi dan pembangunan dalam bukunya *Democracy and development: political institutions and well-being in the world, 1950-1990*. Dalam kajian tersebut, mereka menemukan bahwa pembangunan ekonomi tidak selamanya berkait erat dengan transformasi rejim. Jika dikaitkan dengan kajian Freedom House, memang tidak selamanya negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi akan dengan segera mentransformasi sistem politiknya. Sebagai contoh, Singapura, Brunei dan Malaysia—ketiganya berada di rantau Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi—hingga kini pun belum melakukan perubahan politik ke arah demokrasi. Di sisi lain, terdapat juga negara yang sederhana dan rendah pertumbuhan ekonominya berjaya melaksanakan transformasi politik seperti Mexico

(1994) dan Indonesia (1998), misalnya.

Di luar perdebatan itu, kajian Vanhelen (2003) dan Doorenspleet (2006) juga memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Kajian Huntington dalam bukunya *The third wave* (1991b) juga mempunyai jawaban yang sama, yaitu perkembangan ekonomi yang drastik (dan belum pernah terjadi sebelumnya) pada pertengahan 1970-an dan 1980-an, telah mengakibatkan angka *Gross Domestic Product* (GDP) negara-negara berkembang meningkat dan ini memudahkan berlakunya proses demokratisasi. Oleh karena itulah, dalam analisisnya Huntington membagi tingkatan GNP per kapita kepada tiga kategori, yaitu: (i) pendapatan tinggi (>AS\$6.000), (ii) pendapatan menengah tinggi (AS\$2.000-AS\$5.500) dan (iii) pendapatan menengah rendah (AS\$500-AS\$2.200). Menurut elaborasinya, negara yang memiliki tingkat *upper-middle income* (pendapatan menengah tinggi) mempunyai kecenderungan untuk mampu bergerak ke arah transisi menuju demokrasi. Sedangkan, negara yang memiliki kadar GNP per kapita di atas AS\$6.000, berhasil menjalankan demokrasi secara stabil (lihat Tabel 2). Realitas ini menerangkan bahwa tingkat pendapatan yang mapan mampu mendorong sebuah negara untuk menjadi demokratik.

Tabel 2 Pembangunan Ekonomi dan Demokratisasi Gelombang Ketiga

GNP per kapita tahun 1976 (dalam AS\$)	Pendemokrasian tahun 1974	Mengalami pendemokrasian / liberalisasi tahun 1974-1989	Bukan demokratik	Jumlah	Peratus negara yang mengalami pendemokrasian / liberalisasi
< 250	1	2	31	34	6%
250-1,000	3	11	27	41	29%
1,000-3,000	5	16	5	26	76%
> 3,000	18	2	3	23	40%
Jumlah	27	31	66	124	

Sumber: Huntington (1991b:62).

Pertumbuhan ekonomi ini, mengutip pendapat Huntington (1991b:65), memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan demokrasi dalam dua hal. Di satu sisi, ia memunculkan sumber kekayaan dan kekuasaan baru di luar negara yang semakin sukar dikendalikan oleh rejim otoriter. Di sisi lain, ia mendorong perluasan kelas menengah, "*a larger and larger proportion of society consists of business people, professionals, shopkeepers, teachers, civil servants, managers, technicians, clerical and sales workers*" (Huntington 1991b:66). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menyuburkan benih-benih demokrasi dengan menciptakan dan memperluaskan masyarakat sipil. Kajian ini serupa dengan karya klasik Lipset (1963; 1981) dan Lerner (1964) yang mengungkapkan bahwa kemakmuran ekonomi memungkinkan tumbuh dan berkembangnya angka literasi, tingkat pendidikan (yang) tinggi dan kebebasan media; hal ini secara langsung mendorong munculnya kelas menengah di dalam masyarakat.

Faktor ketiga yang mendorong perubahan politik ke arah demokrasi ialah berlakunya perubahan pada doktrin dan aktivitas gereja Katolik yang dimanifestasikan dalam Majelis Vatikan Kedua pada tahun 1963-1965 serta transformasi gereja nasional dari posisi sebagai pembela kekuasaan kepada penyokong reformasi sosial, ekonomi dan politik. Pada tahun 1970-an, arah tuju utama Pope menjadi lebih jelas dan terbuka ketika menentang pelanggaran HAM. Bahkan pada tahun 1979, Pope John Paul II (1982) secara tersurat menyatakan gereja sebagai penjaga kebebasan. Dengan demikian, di negara-negara dimana gereja Katolik memiliki pengaruh yang kuat (seperti Polandia, Filipina dan di banyak negara di Amerika Latin), para pendeta sangat terlibat dalam gerakan dan aktivitas pendemokrasian. Contoh yang paling umum bisa dilihat dalam gerakan gereja pada awal tahun 1980-an sebelum tumbuhnya aksi *people power* di Filipina dan di Polandia pada pertengahan tahun yang sama.

Faktor keempat ialah perkembangan global baru yang dilaksanakan oleh negara-negara dan organisasi-organisasi besar dunia (*external actors*) yang mulai berpihak terhadap demokrasi. Menurut Huntington (1991b:86), "... by the late 1980s the major sources of power and influence in the world—the Vatican, the European Community, the United States, and the Soviet Union—were actively promoting liberalization and democratization." Hal ini dapat dilihat daripada aktivitas komunitas negara-negara di Eropa pada akhir tahun 1960-an yang berusaha untuk terus memperluas jumlah anggota (cikal bakal European Union, EU) dan mempromosikan HAM. Malah AS, pada puncak perang dingin di tahun 1960-an dan 1970-an, lebih memilih untuk mendukung sebuah rejim otoriter daripada mengutuknya. Ini karena agar beberapa negara sokongan AS tidak berpindah haluan kepada Uni Soviet. Namun, apabila Carter—dan diikuti oleh para penerusnya seperti Reagan, Bush Sr., Clinton dan Bush Jr. menjadi presiden, keseluruhan bahasa diplomasi AS berubah 180 derajat. Carter dan penerusnya—termasuk Gorbachev di Uni Soviet—menjadikan pelanggaran HAM sebagai salah satu agenda dunia yang harus dibasmi untuk mempromosikan negara-negara yang belum demokratik.

Faktor kelima yang mendorong berlakunya perubahan ke arah demokrasi ialah efek bola salju (*snow-*

balling) yang diperkuat oleh sarana teknologi informasi, yang menstimulasi dan menyediakan model untuk mengubah rejim di negara-negara lainnya. Pengaruh demokratisasi model gelindingan bola salju ini menjadi lebih kuat dibandingkan dengan proses pada dua gelombang sebelumnya karena revolusi komunikasi global. Sisi lain dari proses pendemokrasian adalah terjadinya tuntutan perubahan politik dalam bentuk demonstrasi. *Snowballing* demonstrasi yang paling dramatik menurut beberapa sarjana berlaku di negara-negara berpaham komunis pada akhir tahun 1980-an apabila kekuasaan Soviet mulai runtuh (Huntington 1991a; 1991b; Fukuyama 1992; Haggard & Kaufman 1995). Kejatuhan rejim Soviet ini mendorong terjadinya aktivitas masyarakat sipil dan NGO di banyak negara.

Bagi para transitologi, yakni para pakar dan sarjana yang memiliki minat dan kecenderungan akademik atas proses transisi menuju demokrasi, kelima faktor tersebut sangat penting sebagai 'lingkungan' yang mendorong para aktor politik, para pembaharu dan pemimpin publik untuk merealisasikan demokrasi. Ini artinya aktorlah yang menentukan maju atau tidaknya proses pendemokrasian itu sendiri. Sebab, menyitir Rustow (1970), transisi demokrasi dapat berlangsung apabila elit memainkan peran dengan terencana dan tersusun. Ini karena elit inilah yang menggerakkan masyarakat

untuk berubah dengan idea atau gagasan yang matang dan sangat diperlukan.

Pertanyaannya sekarang, benarkah tanggapan bahwa peran elit (para aktor politik, reformis dan pemimpin awam) amat penting dalam menentukan kejayaan proses pendemokrasian? Merujuk pendapat Karl (1990), Huntington (1991b), Stepan (1993), Munck & Leff (1997), transformasi politik tidak pernah berwajah tunggal, seragam, dan juga tidak ditentukan oleh satu faktor semata. Proses itu amat ditentukan oleh banyak hal dan faktor, namun Share (1987) dalam kajiannya menegaskan peran elit dalam proses pendemokrasian adalah sangat penting. Melalui peran elit tersebut muncullah matriks yang menghasilkan empat model proses demokratisasi. Elaborasi Share, keempat proses tersebut adalah seperti berikut: pertama, demokratisasi inkremental atau demokrasi bertahap (*incremental democratization*) yaitu suatu proses pendemokrasian yang dilakukan secara perlahan. Proses demokratisasi ini pernah terjadi di beberapa negara Eropa Utara. Kedua, proses pendemokrasian melalui perjuangan panjang (*transition through protracted, revolutionary, struggle*). Dalam pendekatan ini, elit berkuasa menolak perubahan dan oleh karena itu, perjuangan membangun rejim yang demokrasi adalah (untuk) melawan rejim yang otoriter. Ketiga, proses demokratisasi melalui transaksi (*transition through*

transaction) yaitu transformasi politik ke arah demokrasi yang berjalan dengan cepat serta melibatkan rejim berkuasa. Keempat, proses pendemokrasian melalui perpecahan (*transition through rupture*) yaitu transformasi politik yang berlangsung cepat, hasil dari penentangan dari luar rejim.

Share (1987) seterusnya menyatakan jatuhnya rejim berkuasa adalah disebabkan oleh (i) adanya revolusi yang digerakkan oleh kelompok pendukung demokrasi, (ii) adanya kudeta dari kalangan elit militer atau polisi yang mendukung demokratisasi, (iii) kejatuhan rejim akibat kalah perang atau (iv) rejim secara tiba-tiba kehilangan legitimasi dan segera menyerahkan kekuasaannya pada kekuatan oposisi demokratik (*extrication*). Sebagai catatan akhir, menurut pandangan Share, proses pendemokrasian paling rasional dan paling kecil dampak destruktifnya adalah melalui cara transaksi. Ini karena proses ini membuka kesempatan untuk mendapatkan jalan keluar yang menyenangkan semua pihak. Untuk merealisasikan transisi menuju demokrasi, Share menyarankan beberapa prasyarat, iaitu: (i) adanya *political will* yang kuat dari rejim otoriter untuk mengambil inisiatif reformasi politik dalam rangka menyokong transisi menuju demokrasi, (ii) kelompok oposisi turut serta atau berperan aktif dalam transformasi politik ke arah demokrasi dan (iii) rejim harus mampu mengawal situasi pada masa transisi.

Kajian Share (1987) hampir sama dengan elaborasi transisi menuju demokrasi yang ditawarkan oleh Karl (1990), seorang dosen ilmu politik Stanford University, AS. Dalam artikelnya yang bertajuk 'Dilemma of democratization in Latin America,' Karl (1990) menggunakan dua variabel utama untuk mengkaji proses pendemokrasian (di Amerika Latin) yaitu: pertama, strategi yang dijalankan (kompromi atau tekanan), dan kedua, kekuatan relatif aktor yang terlibat dalam transformasi politik (*relative actor strength*). Matriks dua variabel itu menghasilkan empat proses pendemokrasian yang disebutnya sebagai *modes of transition to democracy* yang meliputi, (i) perjanjian atau persetujuan, (ii) pergantian jabatan, (iii) reformasi dan (iv) revolusi.¹⁷

¹⁷Uraian singkat mengenai proses demokratisasi model Karl (1990) adalah sebagai berikut. Pertamanya, persetujuan adalah pola demokratisasi yang dihasilkan melalui strategi kompromi antarelit. Dalam pola ini, elit berkuasa saling berkompromi (membuat perjanjian ataupun persetujuan) dengan kelompok oposisi untuk melakukan transformasi politik ke arah yang demokratis. Pola ini cenderung tidak merubah komposisi elit (yang sedang) berkuasa. Yang lebih signifikan dari model ini adalah terjadinya perubahan dalam sistem itu sendiri daripada pergantian elit. Menurut Karl (1990), negara-negara yang mengikuti proses ini antaranya ialah Chile (1932-1970), Venezuela (1958), Uruguay (1984) dan lainnya. Berbanding dengan analisis Silva (1996), Panizza (1997) dan Hunter (1998). Ketiga sarjana tersebut mengungkapkan bahwa elit memainkan peran yang sangat penting (lagi dominan) dalam proses demokratisasi. Kedua, imposition (pergantian posisi) adalah proses demokratisasi yang terjadi sebagai dampak dari tekanan kelompok elit oposisi yang berhasil menjatuhkan elit berkuasa. Sebelum proses pendemokrasian berlangsung, biasanya terjadi konflik antara mereka yang

Dalam perkembangan berikutnya, kajian mengenai proses demokratisasi menjadi semakin populer apabila Huntington menulis buku *The third wave: democratization in the late twentieth century* pada tahun 1991. Sebelumnya, beliau telah membangun ideanya ini dalam *Journal of Democracy* dengan tajuk 'Democracy's third wave' (1991a). Inti kajian Huntington dalam buku dan jurnal yang ditulisnya adalah untuk melengkapinya dua kajian terdahulu yang dilakukan oleh Share (1987) dan Karl (1990). Dalam tulisan tersebut, Huntington menyatakan terdapat tiga proses transisi menuju demokrasi;

menghendaki perubahan dengan elit berkuasa yang berusaha mempertahankan kekuasaan (*status quo*). Beberapa negara yang mengikuti proses ini ialah Brazil (1970), Ecuador (1976), Guatemala (1984) dan lainnya. Ketiga ialah reformasi, yaitu proses demokratisasi yang dilakukan oleh massa. Strategi kompromi adalah bentuk utama dalam pola ini. Oleh karena itu, terjadi perbincangan dan perdebatan panjang antara massa (yang menginginkan perubahan) dan elit (yang berusaha mempertahankan kekuasaan) untuk menentukan titik temu transformasi politik yang dikehendaki. Dalam pola ini, pemerintah berada dalam posisi yang lemah, sehingga posisi tawar mereka tidak kuat. Dampak dari kekuatan massa yang lebih unggul adalah rejim berkuasa cenderung menerima tuntutan dari kelompok oposisi untuk melakukan transformasi. Mengikuti pola ini, tidak jarang pimpinan massa menggantikan posisi elit berkuasa dalam pemerintahan. Argentina (1946-1951), Chile (1970-1973), Guatemala (1946-1974) dan lainnya adalah contoh beberapa negara yang mengikuti pola ini. Terakhir ialah revolusi, yaitu suatu proses pendemokrasian oleh massa dengan menggunakan (strategi) paksaan dan tekanan untuk menuntut perubahan. Strategi ini dipilih karena tidak ada jalan lain selain revolusi untuk merealisasikan transformasi politik ke arah demokrasi. Antara negara yang menggunakan jalur ini adalah Mexico (1910-1929), Bolivia (1952) dan Nicaragua (1979).

ketiga proses tersebut ialah transformasi (*transformation*), pergantian (*replacement*) dan *transplacement*.

Transformasi ialah proses perubahan politik dalam sebuah negara—dari nondemokrasi ke arah demokrasi—diketuai oleh elit berkuasa (atau disebut juga perubahan dari atas). Skenario demokratisasi terjadi akibat dari terjadinya perubahan di dalam rejim yang menghendaki mewujudnya demokrasi. Oleh sebab itu, dalam transformasi ini, elit berkuasa sangat menentukan proses pendemokrasian. Kedua *replacement* (pergantian); proses ini terjadi manakala penguasa lama jatuh atau terguling dan kemudiannya digantikan oleh rejim baru yang demokratik. Dalam konteks ini, transisi demokrasi terjadi karena rejim atau penguasa mengalami pembusukan politik, sehingga dengan mudah digulingkan oleh kelompok oposisi yang mengalami penguatan. Ketiga ialah *transplacement*, yaitu suatu proses demokratisasi politik sebagai kombinasi antara gerakan sosial di luar rejim yang mengalami pemeriksaan dengan dorongan dari faksi pendukung demokrasi di dalam rejim berkuasa. Kemudian, gerakan di luar rejim dan faksi prodemokrasi di dalam rejim bekerjasama untuk mengendalikan proses demokratisasi sebagai perwujudan kontrak sosial baru. Dalam konteks ini, para aktor politik, para reformis dan para pemimpin yang terhimpun dalam kelompok oposisi tidaklah sekuat seper-

ti dalam skenario *replacement*; keadaan inilah yang menyebabkan mereka memilih untuk bekerjasama dengan kelompok prodemokrasi di dalam rejim untuk melaksanakan proses pendemokrasian.

Kajian yang lebih kurang sama dengan hujah Huntington (1991b) dibuat pula oleh Stepan (1993). Menurut Stepan, terdapat tiga jalur transisi menuju demokrasi, iaitu: (i) pendemokrasian yang diprakarsai dari dalam rejim, (ii) kekuatan oposisi memainkan peran penting dalam mengakhiri rejim otoriter dan (iii) penaklukan. Mengenai proses pendemokrasian yang diprakarsai dari dalam rejim, Stepan menyatakan kewujudannya adalah sebagai manifestasi dari adanya kesadaran dari dalam rejim untuk melakukan perubahan politik ke arah lebih demokratik. Selanjutnya Stepan menyatakan terdapat tiga proses turunan demokratisasi jenis ini, yaitu demokratisasi yang diprakarsai oleh tentara sebagai pemerintah; demokratisasi yang diprakarsai oleh militer sebagai institusi; dan kelompok sipil dalam rejim memprakarsai transformasi politik demokrasi.¹⁸

¹⁸Dalam proses pertama, Stepan menjelaskan kelompok militer yang merupakan bagian dari rejim mengambil alih pemerintahan untuk mengawal jalannya proses demokratisasi oleh karena munculnya kerusuhan massa dan sebagainya. Pada waktu tertentu, apabila keadaan telah dirasa relatif stabil, maka para elit militer menyerahkan mandatnya kepada pemerintah sipil (yang) baru.

Mengenai kekuatan oposisi memainkan peran penting dalam mengakhiri rejim otokratik, Stepan menyatakan terdapat beberapa skenario yang terjadi dalam tahap ini. Skenario pertama ialah perubahan politik akibat gelombang besar (demonstrasi) rakyat yang menuntut transformasi ke arah demokrasi. Skenario kedua ialah demokratisasi yang diawali oleh partai oposisi dengan mewujudkan koalisi yang bertujuan untuk mengikis kekuatan partai berkuasa dan pemerintah. Skenario ketiga ialah demokratisasi melalui pemberontakan yang dikoordinasikan oleh sebuah partai atau koalisi partai oposisi ke arah demokrasi. Skenario keempat ialah demokratisasi melalui revolusi, yaitu jalan terakhir yang dilakukan oleh kelompok oposisi untuk mengakhiri rejim otokratik.

Mengenai jalur penaklukan pula, Stepan menyatakan terdapat tiga cara penaklukan menuju demokrasi, yaitu: (i) demokratisasi yang menyertakan campur tangan pihak luar negara, (ii) demokratisasi yang dilakukan secara kolaboratif antara aktor dari dalam negara dengan aktor luar negara dan (iii) demokratisasi yang dilakukan oleh aktor dalam negara yang dipantau—jika tidak hendak mengatakan diarahkan—oleh pihak luar agar transformasi politik yang berjalan sesuai dengan visi yang diharapkan. Kelebihan kajian Stepan di atas terletak pada argumennya bahwa proses demokratisasi tidak hanya dipandang sebagai proses internal saja. Sebab

transformasi politik menuju demokrasi juga dilakukan oleh negara internasional yang telah terlebih dahulu demokratik. Oleh karena itu, dalam jalur penaklukannya, nampak pihak luar memainkan peran yang penting dalam proses demokratisasi, baik secara langsung, berkolaborasi ataupun hanya memantau transisi itu. Namun malangnya, proses transisi menuju demokrasi dalam jenis ini acap kali dilakukan dengan cara *hard-intervention* (kekerasan), seperti yang berlaku di Panama (1989), Nicaragua (1990) dan Timor Timur (1999). Ringkasnya, demokratisasi tidak dimonopoli oleh satu pola anjakan atau pergerakan ke arah demokrasi, tetapi meputi beragam pola dan corak. Karena itu, sampai sekarang proses pendemokrasian masih terus dikembangkan dan perdebatkan olah ramai sarjana, paling tidak untuk mendapatkan jawapan yang relatif menggambarkan realitas sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Kesimpulan

Artikel ini telah membahas dua hal besar yaitu demokrasi dan demokratisasi. Pembahasan mengenai kedua konsep dalam artikel ini adalah penting untuk mendiseminasi dalam ruang yang akademik. Hasil elaborasi menunjukkan, konsep demokrasi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: (i) demokrasi prosedural dan (ii) demokrasi substantial. Demokrasi prosedural, salah

satu cirinya adalah sumber kekuasaan diperoleh melalui pemilihan umum yang adil, transparan, inklusif dan berkala. Manakala demokrasi substantif lebih luas dari sekadar pelaksanaan demokrasi secara prosedural. Selain itu, demokrasi substantif turut melibatkan adanya penegakan hukum yang adil, pemerintah yang menghormati dan merealisasikan kesejatian kebebasan sipil dan hak politik rakyat, serta diimplementasikannya mekanisme pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kinerja pemerintah. Akhir sekali, hasil perbincangan konseptual dalam artikel ini juga telah menunjukkan bahwa demokratisasi

adalah proses beralihnya rejim non-demokrasi kepada rejim demokrasi. Oleh sebab itu, demokratisasi bukan semata-mata hanya transisi menuju demokrasi. Tetapi lebih luas daripada itu. Karena itulah, artikel ini juga mengelaborasi pelbagai faktor pendorong pendemokrasian, momentum dan peluang politik serta peran aktif aktor politik demi terlaksananya transformasi politik. Lain dari itu, artikel ini menjelaskan tahap-tahap demokratisasi mengikut teori Huntington yang meliputi *transformation*, *replacement* dan *transplacement*.*

KEPUSTAKAAN

- Barker, E. 1942. *Reflections on government*. Oxford: Clarendon Press.
- Barro, R.J. 1999. *Determinants of economic growth: a cross-country empirical study*. Cambridge: MIT Press.
- Blake, C.H. 1998. Economic reform and democratization in Argentina and Uruguay: the tortoise and the hare revisited? *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 40(3): 1-26.
- Bobbio, N. 1987. *The future of democracy: a defence of the rules of the game*. New York: Polity.
- Bollen, K.A. 1980. Issues in the comparative measurement of political democracy. *American Sociological Review* 45(3): 370-390.
- Brooker, P. 2000. *Non-democratic regime: theory, government and politic*. Houndmill: Macmillan.
- Buckhart, R.E. & Lewis-Back, M.S. 1994. Comparative democracy: the economic development thesis. *American Political Science Review* 88(4): 903-910.
- Cammack, P. 1997. *Capitalism and democracy in the Third World: the doctrine for political development*. London: Leicester University Press.
- Chehabi, H.E. & Linz, J.J. 1998. A theory of sultanisme 1: a type of nondemocratic rule. Dlm. H.E. Chehabi & Juan J. Linz (eds.). *Sultanistic regimes*, 3-25. Baltimore: Johns Hopkins University.
- Collier, D. & Levitsky, S. 1997. Democracy with adjectives: conceptual innovation in comparative reserach. *World Politics* 49(3): 430-451.

- Dahl, R.A. 1971. *Polyarchy: participation and opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R.A. 1989. *Democracy and its critics*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R.A. 1999. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L. 1994a. Introduction: political culture and democracy. Dlm. Larry Diamond (pnyt). *Political culture and democracy in developing countries*, 1-27. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Diamond, L. 1994b. Causes and effects. Dlm. Larry Diamond (ed). *Political culture and democracy in developing countries*, 229-249. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Diamond, L. 2003. *Developing democracy toward consolidation*. Terj. Yogyakarta: IRE Press.
- Diamond, L., Linz, J.J. & Lipset, S.M. 1995. Introduction: what makes for democracy? Dlm. Larry Diamond, Juan J. Linz & Seymour M. Lipset (eds.). *Politics in developing countries: comparing experiences with democracy*, 1-66. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Diamond, L., Linz, J.J. & Lipset, S.M. 1999. Introduction: politics, society, and democracy in Latin America. Dlm. Larry Diamond, Juan J. Linz & Seymour M. Lipset (eds.). *Democracy in developing countries: Latin America*, 1-70. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Doorenspleet, R. 2006. *Democratic transition: exploring the structural sources of the fourth wave*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Fukuyama, F. 1992. *The end of history and the last man*. New York: Free Press.
- Geddes, B. 1999. What do we know about democratization after twenty years? *Annual Review of Political Science* 2: 115-144.
- Gill, G. 2000. *The dynamics of democratization: elites, civil society and transition process*. London: Macmillan Press.
- Gomez, E.T. & Jomo, K.S. 1997. *Malaysia's political economy: politics, patronage and profits*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haggard, S. & Kaufman, R.R. 1995. *The political economy of democratic transitions*. Princeton: Princeton University Press.
- Held, D. 1987. *Models of democracy*. Stanford: Stanford University Press.
- Hilley, J. 2001. *Malaysia: Mahathirism, hegemony and new opposition*. London: Zed Books.
- Hunter, W. 1998. Negotiating civil-military relations in post-authoritarian Argentina and Chile. *International Studies Quarterly* 42(2): 295-317.
- Huntington, S.P. 1991a. Democracy's third wave. *Journal of Democracy* 2(2): 12-34.
- Huntington, S.P. 1991b. *The third wave: democratization in the late twentieth century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Karl, T.L. 1990. Dilemma of democratization in Latin America. *Journal Comparative Politics* 23(1): 1-21.
- Keen, D. 2005. *Conflict and collusion in Sierra Leone*. Oxford: James Currey Publishing.
- King, R. & Kendall, G. 2004. *The state, democracy and globalization*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lane, J-K. & Ersson, S. 2003. *Democracy: a comparative approach*. London: Routledge.

- Lane, M. 2008. *Unfinished nation: Indonesia before and after Soeharto*. London: Verso.
- Lerner, D. 1964. *The passing of traditional societies*. New York: Free Press.
- Linz, J.J. & Stepan, A. 1996. *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lipset, S.M. 1959. Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy. *American Political Science Review* 53(1): 69-105.
- Lipset, S.M. 1963. *Political man: social basis of politics*. New York: Anchor Books.
- Lipset, S.M. 1981. *Political man: social basis of politics*, expanded and updated edition. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lipset, S.M. 1994. The social requisites of democracy revisited. *American Sociological Review* 59(1): 1-22.
- McCoy, A.W. 1993. *An anarchy of families: state and family in the Philippines*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Munck, G.L. & Lef, C.S. 1997. Modes of Transition and Democratization: South America and East Europe in Comparative Perspective. *Comparative Politics* 29(3): 343-362.
- Panizza, F. 1997. Late institutionalisation and early modernisation: the emergence of Uruguay's liberal democratic political order. *Journal of Latin American Studies* 29(3): 667-691.
- Przeworski, A., Alvarez, M., Cheibub, J.A. & Limongi, F. 2000. *Democracy and development: political institutions and well-being in the world, 1950-1990*. New York: Cambridge University Press.
- Putnam, R.D. 1993. *Making democracy work: civic tradition in modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Remmer, K. 1991. *Military rule in Latin America*. Boulder: Westview.
- Rueschemeyer, D., Stephens, E.H. & Stephens, J.D. 1992. *Capitalist development and democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Rustow, D. 1970. Transition to democracy: toward a dynamic model. *Comparative Politics* 2(3): 337-363.
- Schmitter, P.C. & Karl, T.L. 1991. What democracy is ... and is not? *Journal of Democracy* 2(3): 75-88.
- Schumpeter, J.A. 1947. *Capitalism, socialism and democracy*. London: Allen & Unwin.
- Share, D. 1987. Transition to democracy and transition through transaction. *Journal Comparative Political Studies* 19(4): 525-548.
- Silva, E. 1996. From dictatorship to democracy: the business-state nexus in Chile's economic transformation, 1975-1994. *Comparative Politics* 28(3): 299-320.
- Stepan, A. 1993. Berbagai jalur menuju demokratisasi: sejumlah pertimbangan teoritis dan komparatif. Dlm. Guillermo O'Donnell, Phillippe C. Schmitter & Lawrence Whitehead (eds.). *Transisi menuju demokrasi: tinjauan berbagai perspektif*, 107-143. Terj. Jakarta: LP3ES.
- Sullivan, J.L., Piereson, J. & Marcus, G.E. 1982. *Political tolerance and American democracy*. Chicago: University of Chicago Press.

Tilly, C. 2007. *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Uhlir, A. 2002. Development and the external dimension of regime transitions: illustration from Indonesia. Dlm. Ole Elgström & Goran Hyden (eds.). *Development and democracy: what have we learned and how?*, 173-190. London: Routledge.

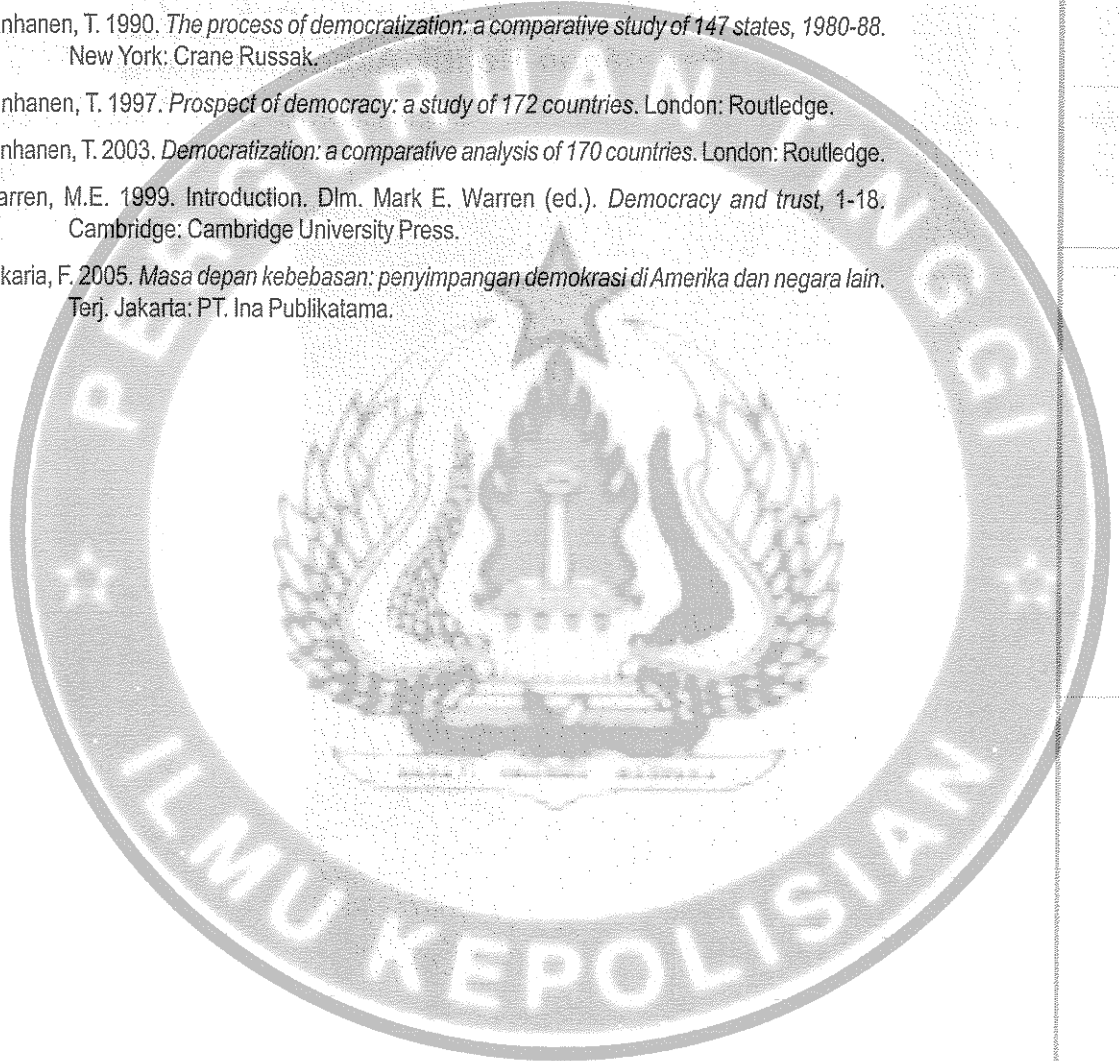
Vanhanen, T. 1990. *The process of democratization: a comparative study of 147 states, 1980-88*. New York: Crane Russak.

Vanhanen, T. 1997. *Prospect of democracy: a study of 172 countries*. London: Routledge.

Vanhanen, T. 2003. *Democratization: a comparative analysis of 170 countries*. London: Routledge.

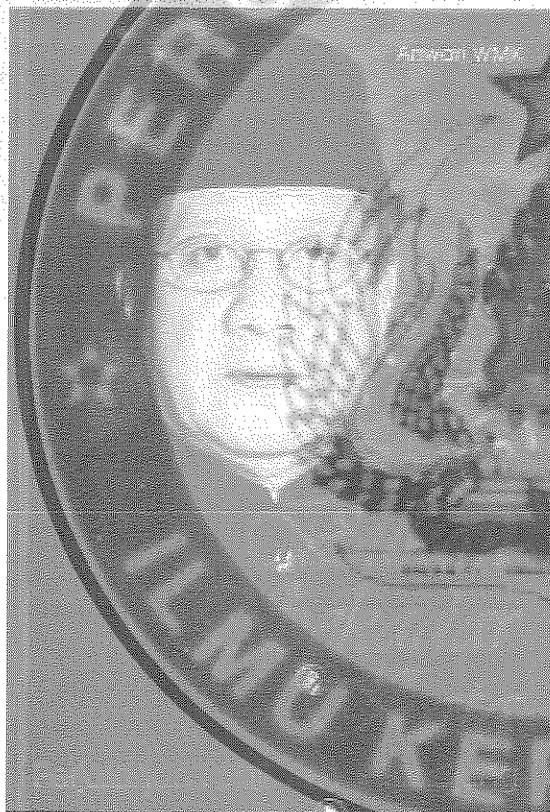
Warren, M.E. 1999. Introduction. Dlm. Mark E. Warren (ed.). *Democracy and trust*, 1-18. Cambridge: Cambridge University Press.

Zakaria, F. 2005. *Masa depan kebebasan: penyimpangan demokrasi di Amerika dan negara lain*. Terj. Jakarta: PT. Ina Publikatama.



Dapatkan !

Bukan Sekadar Kata
Perjalanan Politik Akbar Tandjung
Anwari M.K



Pesan

atau datang langsung ke alamat kami:

Jl. Pancoran Indah Raya, Liga Mas Blok B, No. A1

Perdatam Jakarta, 12780-Indonesia

Telepon: 021-7996385

E-mail : toakbartandjunginstitute@akbartandjunginstitute.org

Website: www.akbartandjunginstitute.org

